

BRIN TANPA *BRAIN*

Carunia Mulya Fidausy
Guru Besar FEB-UNTAR

Awal Januari 2022, dunia riset dikagetkan dengan adanya berita seratusan saintis Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman (LBME) dipecat tanpa pesangon. Berita yang sama juga terjadi kepada puluhan ABK Kapal Riset Baruna Jaya yang langsung diperintahkan meninggalkan kapal per 1 Januari 2022 tanpa pesangon. Kekagetan ini tentu bukan karena sebatas pecat memecat saja yang memang bukan suatu hal baru dan tabu. Kekagetan itu terjadi karena para pegawai atau karyawan yang dipecat-pecat itu tidak diberi pesangon. Penyebabnya, “mereka pegawai non-PNS atau non ASN sehingga tidak berhak menerima pesangon”, tegas Kepala BRIN seperti dinyatakan di media sosial maupun pada Apel BRIN pagi 3 Januari 2022.

Kasus seperti ini sebenarnya sudah terjadi sebelumnya, baik di BPPT, LIPI, BATAN, dan mungkin juga di lembaga penelitian lain sebagai buntut peleburan 4 LPNK (LAPAN, BATAN, LIPI dan BPPT). Detail jumlahnya belum dapat dipastikan, tetapi menurut sumber yang dapat dipercaya diperkirakan lebih dari 1500 orang. Korbannya umumnya pegawai honorer atau pegawai non-PNS pendukung baik langsung atau tidak langsung kegiatan riset dan inovasi di 4 LPNK, seperti SATPAM, Tukang Kebun, *Cleaning servers*, pegawai administrasi, Anak Buah Kapal (ABK), analis kebijakan, staf laboratorium, dan sejenis lainnya. Beberapa lembaga diantaranya kemudian bergotong royong memberikan pesangon dan bahkan tidak jarang yang membantu para pegawai non-PNS yang bernasib malang tersebut dengan cara tetap mempekerjakannya.

Pegawai dalam kelompok tersebut memang dapat diperdebatkan tingkat kebutuhan dan produktivitasnya. Namun saya yakini mereka memiliki kontribusi yang tidak bisa sederhana saja untuk diabaikan dalam kegiatan riset dan inovasi di tiap LPNK. Sedangkan peneliti dan perekayasa dan sejenisnya di LPNK nyaris aman karena umumnya pegawai ASN, kecuali ilmuwan, peneliti atau dan laborant non- ASN di LBME.

Efek pemberhentian pegawai non-ASN telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan kerja peneliti dan perekayasa dan staf pendukung ASN. Belajar dari pengalaman di LIPI, misalnya, pengurusan terkait administrasi menjadi lambat sebagai akibat disentralisasikannya atau disedotnya tenaga administrasi pada tiap pusat penelitian di bawah sektariat utama LIPI. Bahkan efek yang terburuk yang sayangnya tidak kasat mata namun terasa yakni terpecahnya peneliti dan non peneliti ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok pro-reorganisasi/peleburan, kelompok “penentang reorganisasi dengan cara pecat memecat dan komersialisi asset”, kelompok oportunis, dan kelompok yang tidak mau tahu. Ini misalnya diindikasikan dari komentar solidaritas ASN BRIN kepada kolega ilmuwan dan peneliti LBM Eijkman yang bermunculan pada Zoom apel pagi BRIN tanggal 3 Januari lalu. Begitu pula bentuk keprihatinan yang disebarkan pada instagram, Telegram, Twitter, dan WAGroup berlabel #save_karyawan Eijkman dan Barunajaya.

Pecat memecat atau pemberhentian pegawai memang suatu cara sangat mudah dengan kualitas pikir rendah tanpa kalbu untuk melakukan efisiensi dalam suatu organisasi. Dengan memberhentikan pegawai berarti salah satu beban biaya organisasi berkurang. Namun cara tersebut bukan satu-satunya cara melakukan efisiensi. Efisiensi juga dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan faktor produksi (dalam hal ini

pegawai) dalam organisasi menjadi lebih produktif (baca misalnya, Sedarmayanti, 2014; Acemoglu dan Robinson, 2012). Jadi efisiensi dengan cara memberhentikan yang dilakukan terhadap pegawai non-PNS pada LBME, BPPT, LIPI, ABK kapal Riset Baruna Jaya atau lembaga penelitian lain selama ini atas nama efisiensi sungguh sebagai cara yang kurang arif dan bijaksana. Cara tersebut apapun alasannya, tidak berlebihan jelas-jelas mencederai nilai-nilai Pancasila yang selalu dibaca lantang pada setiap apel Senin pagi BRIN.

Benar memang sejak Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional diundangkan, BRIN telah cukup banyak melakukan kerja, kerja, dan kerja. Selain pekerjaan mewajibkan ASN BRIN mengisi absen di website yang telah terintegrasi dan apel pagi pada hari Senin, berbagai reorganisasi melalui peleburan telah dilakukan baik untuk 4 Lembaga Pemerintah Non Kementerian-LPNK (BPPT, BATAN, LIPI dan LAPAN) maupun Lembaga Pemerintah Kementerian-LPK (Kementerian Kesehatan, Perdagangan dan lain-lain), juga dengan pembentukan struktur organisasi baik kedeputian dan Organisasi Riset, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta perangkat dibawahnya termasuk penunjukkan pejabat Pelaksana Harian dan Pejabat Pelaksana Tugas, pembentukan rumah program riset, pengangkatan calon PNS, maupun memampangkan logo BRIN di kantor-kantor yang telah dilebur ke dalam BRIN.

Terlepas dari apresiasi tinggi *vis a vis* berbagai kritik dan saran bernuansa pemborosan oleh berbagai pihak atas kerja yang dilakukan BRIN selama ini, anehnya strategi dan taktik BRIN dalam program riset dan inovasi nasional yang semestinya dirumuskan dan dipromosikan kepada publik justru tidak pernah terdengar alias gelaf. Padahal, perintah Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang

Badan Riset dan Inovasi Nasional khususnya pada Bab 3 pasal 4 ayat b dan c harus dijadikan kunci atau substansi fungsi tugas utama dari dibentuknya BRIN.

Pertanyaan Presiden Jokowi terkait dominasi ekosistem riset oleh lembaga pemerintah yang selama ini tidak menghasilkan produk yang kompetitif di tingkat global selama ini mestinya harus didetailkan BRIN. Begitu pula dengan jawaban terhadap pertanyaan bagaimana anggaran puluhan triliun yang akan digelontorkan ke BRIN dikaitkan dengan temuan apa yang akan BRIN banggakan di taraf global juga mutlak diketahui dunia riset dan para pemangku kepentingan lainnya. Juga, bagaimana BRIN menghasilkan riset dan inovasi untuk menjawab komplain masyarakat terhadap riset dan inovasi yang disebut-sebut tidak bisa berkompetisi. Bahkan apa dan bagaimana kebaruan dalam ekosistem riset dan inovasi yang akan dirumuskan dan dicapai BRIN agar memberikan manfaat ekonomi besar mutlak dijelaskan kepada publik? Demikian pula dengan strategi dan taktik bagaimana BRIN dalam meningkatkan kualitas periset dan perekayasa yang katanya rendah, dan seterusnya dan sebagainya.

Jika pertanyaan-pertanyaan di atas tidak dijelaskan jawabannya oleh BRIN, lantas mau dibawa kemana BRIN ini? Apakah kehadiran BRIN hanya sebatas *Reinventing the Wheel* yang bersifat coba-coba? Ataukah kehadiran BRIN ini untuk memuaskan pikiran sepihak saja? Ataukah kehadiran BRIN cuma untuk mengharuskan periset, perekayasa dan ASN BRIN lainnya untuk mengisi absen dan atau mengikuti apel pagi saja yang sebelumnya tidak biasa dilakukan? Bukankah BRIN punya kewajiban mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dipakai?

Jawaban BRIN atas pertanyaan substantive dan kunci terkait apa dan bagaimana strategi dan taktik BRIN dalam program riset dan inovasi nasional secara visioner dan terukur semestinya diungkapkan BRIN dan bukan hanya berkutat dengan masalah

administrasi, teknis, komersialisasi aset, peleburan dan pecat memecat yang membuat dunia riset dan inovasi kisruh, gonjang ganjing, maraknya hoaks dan penulis artikel tanpa nama asli. Penjelasan ini sangat utama dan terutama penting untuk meyakinkan publik bagaimana strategisnya kehadiran BRIN ini dan sekaligus untuk meredam pikiran-pikiran yang bersebrangan dengan dibentuknya BRIN (Baca, misalnya, Gde Siriana Yusuf, 2022; Danie Mohammad Rosyid, 2022; Lily Hikam, 2022). Saya yakin Presiden Jokowi dan 10 Anggota Dewan Pengarah BRIN, dan kita semua ingin hal ini dijelaskan dan diyakinkan BRIN kepada dunia riset dan inovasi nasional. Jika tidak, BRIN hanya sebuah Badan Riset dan Inovasi kosong tanpa **BRAIN**.